



Pilkada, Aspek Edukasi, dan Nilai-Nilai Demokrasi di Kalangan Mahasiswa UNM

Ahmad Subair

Universitas Negeri Makassar

Alamat: Jl. AP Pettarani

Korespondensi penulis: ahmadsubair23@outlook.com

Abstract. *This research aims to analyze the participation of Makassar State University (UNM) students in the Pilkada and expand the extent to which aspects of political education and understanding of democratic values are applied among students. Using a quantitative descriptive survey method, data was collected from 385 respondents selected through simple random sampling techniques. The research results show that 62% of UNM students participated in the Pilkada, but most relied on information from social media rather than formal education on campus. The political education received on campus is still deemed to be less relevant in preparing students for regional elections, even though most students understand the basic concepts of democracy. A positive correlation of 0.62 was found between the quality of political education and the implementation of democratic values such as freedom of expression and equality. This research concludes that increasing student participation in regional elections can be achieved through improvements in political education approaches on campus. More contextual and practical education can strengthen the understanding and implementation of democratic values among students, so that they are better prepared to play an active role in the democratic process. It is hoped that the results of this research can become a reference in developing political education programs in higher education environments*

Keywords: *Regional elections, political education, democratic values, students, UNM*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) dalam Pilkada serta mengevaluasi sejauh mana aspek edukasi politik dan pemahaman terhadap nilai-nilai demokrasi diterapkan di kalangan mahasiswa. Dengan menggunakan metode survei kuantitatif deskriptif, data dikumpulkan dari 385 responden yang dipilih melalui teknik simple random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 62% mahasiswa UNM berpartisipasi dalam Pilkada, namun sebagian besar mengandalkan informasi dari media sosial daripada dari edukasi formal di kampus. Edukasi politik yang diterima di kampus dirasa masih kurang relevan dalam mempersiapkan mahasiswa menghadapi Pilkada, meskipun sebagian besar mahasiswa memahami konsep dasar demokrasi. Korelasi positif sebesar 0.62 ditemukan antara kualitas edukasi politik dan penerapan nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berpendapat dan kesetaraan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan partisipasi mahasiswa dalam Pilkada dapat dicapai melalui perbaikan dalam pendekatan edukasi politik di kampus. Edukasi yang lebih kontekstual dan praktis dapat memperkuat pemahaman dan implementasi nilai-nilai demokrasi di kalangan mahasiswa, sehingga mereka lebih siap berperan aktif dalam proses demokrasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan program pendidikan politik di lingkungan perguruan tinggi.

Kata kunci: *Edukasi politik Pilkada, demokrasi, mahasiswa, nilai-nilai, UNM.*

LATAR BELAKANG

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia merupakan salah satu bentuk implementasi demokrasi langsung yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk secara aktif terlibat dalam proses pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan Pilkada seringkali dihadapkan pada berbagai permasalahan kompleks yang menghambat terwujudnya pemimpin yang ideal. Salah satu masalah paling menonjol dalam Pilkada adalah maraknya politik uang. Praktik memberikan uang atau materi lainnya kepada

pemilih untuk mempengaruhi pilihan mereka telah menjadi fenomena yang sulit diberantas. Politik uang tidak hanya merendahkan martabat pemilih, tetapi juga melahirkan pemimpin yang lebih berorientasi pada kepentingan pribadi dan kelompok tertentu daripada kepentingan masyarakat luas. Akibatnya, kualitas kepemimpinan menjadi menurun dan menghambat pembangunan daerah (Hutapea, 2015).

Angkutan politik (mobilisasi), yaitu praktik “mengangkut” pemilih dari satu tempat ke tempat pemungutan suara dengan iming-iming tertentu, juga menjadi persoalan serius dalam Pilkada. Praktik ini seringkali dibarengi dengan intimidasi atau paksaan terhadap pemilih untuk memilih calon tertentu. Angkutan politik tidak hanya melanggar prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik sosial dan mengganggu keamanan pelaksanaan Pilkada (Rahmadi, 2014.).

Rendahnya tingkat pendidikan politik masyarakat menjadi salah satu faktor yang memperparah masalah dalam Pilkada. Banyak pemilih yang belum memahami hak dan kewajibannya dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi. Akibatnya, mereka mudah terpengaruh oleh iming-iming materi atau intimidasi dari pihak-pihak tertentu. Pendidikan politik yang memadai sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih pemimpin yang berkualitas dan bertanggung jawab (Soerdawo Et.al, 2019).

Politik praktis yang cenderung pragmatis dan oportunistis juga menjadi penyebab utama masalah dalam Pilkada. Para calon kepala daerah seringkali lebih fokus pada upaya meraih kemenangan dalam Pilkada daripada pada penyusunan program kerja yang realistis dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Akibatnya, janji-janji kampanye seringkali tidak ditepati setelah calon terpilih menjadi kepala daerah (Windharti, Et. al, & 2021, n.d.).

Krisis etika politik juga menjadi masalah yang serius dalam Pilkada. Banyak calon kepala daerah dan partai politik yang tidak memiliki komitmen terhadap nilai-nilai moral dan etika dalam berpolitik. Praktik-praktik seperti black campaign, fitnah, dan adu domba seringkali terjadi dalam Pilkada. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya etika politik masih sangat rendah di kalangan para pelaku politik (Bawaslu & 2017.).

Sejarah pelaksanaan Pilkada di Indonesia menunjukkan adanya dinamika yang kompleks. Pada awalnya, Pilkada dilakukan secara tidak langsung melalui pemilihan oleh DPRD. Namun, seiring dengan perkembangan demokrasi, sistem Pilkada langsung secara

bertahap diberlakukan. Meskipun Pilkada langsung memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi, namun masalah-masalah seperti politik uang, angkutan politik, dan rendahnya pendidikan politik tetap menjadi tantangan yang sulit diatasi (Huda, 2017).

Dalam kondisi ideal, seorang pemimpin daerah diharapkan memiliki integritas yang tinggi, visi yang jelas, kemampuan kepemimpinan yang kuat, dan komitmen yang kuat untuk melayani masyarakat. Namun, dalam kenyataannya, banyak pemimpin daerah yang terpilih melalui Pilkada tidak memenuhi kriteria tersebut. Beberapa kenyataan yang bertentangan dengan kondisi ideal pemimpin antara lain: Korupsi: Banyak kepala daerah yang terlibat dalam kasus korupsi, baik dalam bentuk pengadaan barang dan jasa maupun dalam bentuk penyalahgunaan wewenang. Menurut Indonesia Corruption Watch terdapat setidaknya tidak kurang 61 kasus kepala daerah yang terlibat kasus tindak pidana korupsi antara 2021-2023 (Huda, 2017). Pada Kasus Nepotisme Beberapa kepala daerah cenderung mengutamakan kepentingan keluarga atau kelompoknya sendiri dalam pengambilan keputusan. Kualitas kepemimpinan yang rendah: Banyak kepala daerah yang tidak memiliki kemampuan manajerial yang memadai untuk memimpin daerah. Kurangnya visi: Beberapa kepala daerah tidak memiliki visi yang jelas tentang arah pembangunan daerah. Kurangnya komitmen terhadap janji kampanye: Banyak kepala daerah yang tidak memenuhi janji-janji kampanyenya setelah terpilih (Sedarmayanti, 2012).

Pemilihan kepala daerah di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan kompleks yang menghambat terwujudnya pemimpin yang ideal. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, partai politik, masyarakat sipil, dan media massa. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain: Penegakan hukum yang konsisten terhadap praktik politik uang dan pelanggaran lainnya. Peningkatan kualitas pendidikan politik masyarakat. Reformasi sistem partai politik. Penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi (Sawir, 2020).

Dengan upaya bersama, diharapkan kualitas kepemimpinan daerah dapat ditingkatkan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Tentu harapan untuk perbaikan kehidupan berdemokrasi menjadi dambaan seluruh lapisan masyarakat.

Termasuk masyarakat akademik di beberapa kampus. Berbicara masalah kampus dan demokrasi pendulum pembahasan akan mengarah pada konteks ideal demokrasi. Tentu sangat bertentangan dengan kondisi pada masyarakat umum yang cenderung transaksional.

Pada tulisan ini setidaknya kami akan membahas dan menelusuri tiga hal substansial, yaitu, pilkada tentu dengan segala fakta yang melekat dengannya, kedua dunia akademik kampus yang berhubungan dengan idealisme yang berujung pada unsur unsur edukatif, yang ketiga adalah nilai-nilai demokrasi. Ketiga hal tersebutlah yang akan di lihat secara mendalam dan terkoneksi. Apakah stereotype terhadap mahasiswa, kampus, dan nilai nilai demokrasi masih eksis sebagai sebuah pemahaman ideal, atau justru sebaliknya. Tulisan ini akan menjawabnya dalam sebuah lokus pada kampus Universitas Negeri Makassar (Prihatiningsih, 2021).

KAJIAN TEORITIS

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pilkada memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan pemimpin daerah mereka. Di kalangan mahasiswa, khususnya Universitas Negeri Makassar (UNM), Pilkada menjadi salah satu sarana edukasi demokrasi yang penting. Mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda memiliki peran strategis dalam menyukseskan proses demokrasi ini. Dalam konteks ini, aspek edukasi dan nilai-nilai demokrasi menjadi penting untuk dibahas, mengingat mahasiswa adalah agen perubahan yang berperan dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan bermartabat (Ramdani, 2022).

Mahasiswa sebagai kelompok intelektual terpelajar seharusnya memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya Pilkada sebagai bagian dari proses demokrasi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat partisipasi dan pemahaman demokrasi di kalangan mahasiswa masih bervariasi. Beberapa di antaranya mungkin memiliki kesadaran politik yang tinggi, namun ada pula yang kurang peduli terhadap dinamika politik, termasuk dalam Pilkada. Oleh karena itu, peran edukasi politik sangat

penting untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dalam proses demokrasi (Tuhuteru, 2022).

Pilkada Sebagai Manifestasi Demokrasi

Pilkada adalah salah satu bentuk nyata dari penerapan demokrasi di tingkat lokal. Demokrasi, dalam konteks ini, mengacu pada pemerintahan yang diatur oleh rakyat, di mana pemimpin dipilih melalui proses pemilihan umum yang bebas, adil, dan transparan. Dalam Pilkada, warga negara diberi kesempatan untuk menentukan pemimpin daerah mereka secara langsung. Ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili kepentingan mereka dan membawa perubahan positif bagi masyarakat (Jurdi, 2018).

Di kalangan mahasiswa, Pilkada tidak hanya dilihat sebagai ajang pemilihan pemimpin, tetapi juga sebagai sarana untuk mempraktikkan nilai-nilai demokrasi seperti partisipasi politik, kebebasan berpendapat, dan penghormatan terhadap perbedaan. Mahasiswa yang terlibat dalam proses Pilkada memiliki kesempatan untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana demokrasi berfungsi, baik dari segi teori maupun praktik. Partisipasi mahasiswa dalam Pilkada dapat menjadi cerminan dari sejauh mana pemahaman mereka terhadap demokrasi dan bagaimana mereka mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari (Tjenreng, 2020).

Edukasi Politik di Kalangan Mahasiswa

Edukasi politik merupakan proses penting yang bertujuan untuk membentuk individu menjadi warga negara yang sadar akan hak dan tanggung jawab politiknya. Bagi mahasiswa, edukasi politik dapat datang dari berbagai sumber, baik formal maupun informal. Secara formal, Sejarah Politik dan Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi merupakan salah satu bentuk edukasi politik yang diperoleh mahasiswa. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diajarkan tentang konsep-konsep dasar demokrasi, sistem pemerintahan, dan hak serta kewajiban sebagai warga negara (Sutrisman, 2019).

Selain itu, kegiatan organisasi mahasiswa, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa, dan organisasi lainnya, juga memberikan ruang bagi mahasiswa untuk belajar tentang politik dan demokrasi. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya belajar secara teori, tetapi juga mempraktikkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan kampus, seperti dalam proses pemilihan ketua organisasi atau dalam menyuarakan aspirasi kepada pihak kampus (Sutrisman, 2019).

Pilkada dapat menjadi bagian dari proses edukasi politik bagi mahasiswa, di mana mereka dapat mengamati dan terlibat langsung dalam proses politik di daerah. Melalui keterlibatan dalam Pilkada, mahasiswa dapat belajar tentang mekanisme pemilihan, pentingnya partisipasi dalam pemilihan, serta bagaimana calon-calon kepala daerah menawarkan program-program yang mereka tawarkan. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap politik lokal dan pentingnya kontribusi mereka dalam proses demokrasi (Tiansah, 2023).

Nilai-Nilai Demokrasi di Kalangan Mahasiswa

Demokrasi tidak hanya sekadar sistem pemerintahan, tetapi juga mencakup nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara. Di kalangan mahasiswa, nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berpendapat, kesetaraan, toleransi, dan penghormatan terhadap hukum menjadi sangat penting. Mahasiswa diharapkan dapat menjadi teladan dalam mengamalkan nilai-nilai demokrasi tersebut dalam kehidupan kampus maupun masyarakat (Harefa Et. al, 2020).

Kebebasan berpendapat, misalnya, merupakan salah satu nilai demokrasi yang sangat relevan di kalangan mahasiswa. Sebagai individu yang sedang berada dalam proses pendidikan tinggi, mahasiswa seringkali dihadapkan pada berbagai isu sosial, politik, dan ekonomi yang membutuhkan pemikiran kritis. Dalam konteks Pilkada, mahasiswa harus mampu mengekspresikan pendapat mereka dengan bebas dan tanpa rasa takut. Mereka juga harus terbuka terhadap pandangan orang lain, meskipun pandangan tersebut mungkin berbeda dengan keyakinan mereka sendiri (Sutrisman, 2019).

Kesetaraan juga menjadi nilai demokrasi yang penting di kalangan mahasiswa. Dalam demokrasi, setiap suara memiliki bobot yang sama, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau pendidikan. Dalam Pilkada, setiap warga negara, termasuk mahasiswa, memiliki hak yang sama untuk memilih pemimpin daerah mereka. Oleh karena itu, mahasiswa harus memahami bahwa mereka memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan daerah melalui partisipasi dalam Pilkada (Sardini, 2011).

Toleransi dan penghormatan terhadap hukum juga merupakan nilai-nilai demokrasi yang perlu dijaga oleh mahasiswa. Dalam konteks Pilkada, toleransi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menghormati perbedaan pandangan politik di antara sesama mahasiswa maupun masyarakat luas. Penghormatan terhadap hukum berarti mahasiswa harus memahami dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam

pelaksanaan Pilkada, termasuk dalam hal kampanye, pemungutan suara, dan pengumuman hasil Pilkada.

Partisipasi Mahasiswa dalam Pilkada

Partisipasi mahasiswa dalam Pilkada menjadi salah satu indikator penting untuk menilai sejauh mana mahasiswa memahami dan mengamalkan nilai-nilai demokrasi. Partisipasi dalam Pilkada tidak hanya terbatas pada penggunaan hak pilih, tetapi juga dapat mencakup keterlibatan aktif dalam kampanye politik, menjadi pemantau pemilu, atau bahkan mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, meskipun untuk hal ini mungkin masih jarang terjadi di kalangan mahasiswa (Rahmaini, Et. al, 2022).

Di sisi lain, rendahnya partisipasi politik di kalangan mahasiswa dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti apatisme politik, kurangnya pemahaman terhadap pentingnya Pilkada, atau ketidakpercayaan terhadap sistem politik yang ada. Oleh karena itu, penting bagi perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat untuk mendorong partisipasi mahasiswa dalam Pilkada melalui berbagai program edukasi politik dan sosialisasi Pilkada yang efektif.

Dalam konteks UNM, partisipasi mahasiswa dalam Pilkada dapat ditingkatkan melalui penyelenggaraan diskusi, seminar, atau lokakarya yang membahas isu-isu politik dan demokrasi. Selain itu, kampus juga dapat berperan aktif dalam menyediakan ruang bagi mahasiswa untuk menyuarakan pendapat mereka mengenai calon-calon kepala daerah serta program-program yang ditawarkan.

Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Partisipasi Mahasiswa

Meskipun Pilkada merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang penting, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi mahasiswa, khususnya di UNM. Salah satu tantangan terbesar adalah apatisme politik di kalangan mahasiswa. Banyak mahasiswa yang merasa bahwa Pilkada tidak memiliki dampak langsung terhadap kehidupan mereka, sehingga mereka memilih untuk tidak berpartisipasi. Hal ini diperparah dengan adanya ketidakpercayaan terhadap sistem politik yang dianggap korup atau tidak transparan.

Selain itu, minimnya edukasi politik yang berkelanjutan juga menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi mahasiswa dalam Pilkada. Meskipun mahasiswa telah mendapatkan pendidikan formal tentang demokrasi, seringkali hal ini tidak cukup untuk membangkitkan minat mereka terhadap politik. Oleh karena itu, diperlukan

pendekatan yang lebih kreatif dan interaktif dalam menyampaikan edukasi politik kepada mahasiswa.

Di sisi lain, terdapat peluang besar untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam Pilkada, terutama dengan memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial. Mahasiswa sebagai generasi digital sangat akrab dengan penggunaan media sosial, yang dapat menjadi sarana efektif untuk menyebarkan informasi dan membangun kesadaran politik. Melalui platform-platform media sosial, diskusi-diskusi mengenai Pilkada, calon kepala daerah, dan program-program mereka dapat disebarluaskan dengan cepat dan melibatkan lebih banyak mahasiswa dalam percakapan politik. Kampanye politik yang dijalankan melalui media sosial juga cenderung lebih menarik bagi mahasiswa karena sifatnya yang interaktif dan dinamis (Perangin-angin & Zainal, 2018).

Selain itu, kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan organisasi mahasiswa dalam mengadakan kegiatan politik juga dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kesadaran politik mahasiswa. Kegiatan seperti debat politik, forum diskusi, dan simulasi pemilu dapat menjadi sarana edukasi yang menarik dan menyenangkan bagi mahasiswa, sekaligus memberikan pengalaman praktis dalam berpartisipasi dalam demokrasi (Chalik, 2017).

Pilkada merupakan instrumen penting dalam mewujudkan demokrasi yang sehat, dan di kalangan mahasiswa UNM, Pilkada juga dapat menjadi sarana edukasi politik yang efektif. Mahasiswa memiliki peran strategis dalam menyukseskan Pilkada dan dalam mengamalkan nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berpendapat, kesetaraan, toleransi, dan penghormatan terhadap hukum. Meski demikian, terdapat tantangan seperti apatisme politik dan minimnya edukasi politik yang dapat menghambat partisipasi mahasiswa dalam Pilkada. Namun, dengan pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial serta kerjasama antara berbagai pihak, partisipasi mahasiswa dalam Pilkada dapat ditingkatkan.

Dalam konteks UNM, penting bagi semua pihak, baik mahasiswa, pihak kampus, maupun pemerintah, untuk saling bekerjasama dalam mengedukasi dan mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam Pilkada. Dengan demikian, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang mampu berperan dalam mewujudkan demokrasi yang lebih baik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk mengukur pemahaman mahasiswa UNM terhadap Pilkada, aspek edukasi politik, dan penerapan nilai-nilai demokrasi. Penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang terstruktur kepada mahasiswa UNM dari berbagai fakultas. Kuesioner tersebut dirancang untuk mengidentifikasi tingkat partisipasi mahasiswa dalam Pilkada, pemahaman mereka mengenai aspek edukasi politik yang diperoleh dari lingkungan kampus maupun luar kampus, serta sejauh mana mereka menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari (Caroline, 2019).

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif Universitas Negeri Makassar (UNM) yang terdaftar selama tahun akademik penelitian. Sampel diambil menggunakan teknik random sampling dengan mempertimbangkan proporsi mahasiswa dari berbagai fakultas dan program studi. Dengan teknik ini, diharapkan hasil penelitian dapat menggambarkan secara representatif pandangan dan sikap mahasiswa UNM terhadap Pilkada serta nilai-nilai demokrasi yang mereka terapkan. Ukuran sampel ditentukan berdasarkan rumus Slovin, dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 5%.

Instrumen penelitian yang digunakan berupa kuesioner dengan skala Likert untuk mengukur persepsi mahasiswa terhadap berbagai aspek yang diteliti. Kuesioner tersebut dibagi menjadi tiga bagian utama: (1) tingkat partisipasi dalam Pilkada, (2) sumber dan kualitas edukasi politik yang diterima mahasiswa, serta (3) penerapan nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berpendapat, kesetaraan, dan toleransi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan kecenderungan jawaban responden, serta uji korelasi untuk melihat hubungan antara edukasi politik dan penerapan nilai-nilai demokrasi di kalangan mahasiswa.

Pengumpulan data dilakukan dalam rentang waktu dua bulan, dimulai dengan sosialisasi penelitian dan dilanjutkan dengan penyebaran kuesioner secara daring. Data yang diperoleh dari responden kemudian diolah dan dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik SPSS untuk melihat distribusi data, hubungan antar variabel, serta kecenderungan partisipasi mahasiswa dalam Pilkada. Hasil analisis ini akan digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai peran Pilkada sebagai sarana edukasi politik dan implementasi nilai-nilai demokrasi di kalangan mahasiswa UNM.

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode survei. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang ada tanpa melakukan intervensi langsung terhadap variabel. Melalui metode survei, penelitian ini akan mengukur pemahaman, partisipasi, serta sikap mahasiswa UNM terkait Pilkada, edukasi politik, dan penerapan nilai-nilai demokrasi.

Survei ini menggunakan kuesioner terstruktur sebagai instrumen pengumpulan data. Kuesioner akan disebarluaskan secara daring kepada mahasiswa dari berbagai fakultas di UNM. Setiap pertanyaan dalam kuesioner dirancang menggunakan skala Likert 1-5 untuk memudahkan pengukuran sikap dan persepsi responden. Penelitian ini juga akan menguji apakah terdapat hubungan antara variabel partisipasi dalam Pilkada dan pemahaman terhadap nilai-nilai demokrasi.

Populasi Dan Sample

Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif Universitas Negeri Makassar (UNM) pada tahun akademik penelitian. Untuk memperoleh sampel yang representatif, digunakan teknik simple random sampling. Hal ini bertujuan agar setiap mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai responden. Ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin: $n = \frac{N}{1+N(e)^2}$

Keterangan:

- n = jumlah sampel
- N = jumlah populasi (total mahasiswa UNM)
- e = margin of error (ditetapkan 5%)

Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen utama yang digunakan adalah kuesioner tertutup dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengukur tiga aspek utama:

1. Tingkat partisipasi mahasiswa dalam Pilkada.
2. Edukasi politik yang diterima dari kampus dan sumber lain.
3. Pemahaman dan penerapan nilai-nilai demokrasi, seperti kebebasan berpendapat, kesetaraan, dan toleransi.

Setiap pernyataan dalam kuesioner akan diberi bobot berdasarkan skala Likert:

1. = Sangat Tidak Setuju
2. = Tidak Setuju
3. = Netral
4. = Setuju
5. = Sangat Setuju

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan **analisis statistik deskriptif** dan **inferensial**. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan distribusi data, frekuensi jawaban responden, dan kecenderungan partisipasi mahasiswa. Sementara itu,

analisis inferensial (misalnya, uji korelasi Pearson) akan digunakan untuk melihat hubungan antara edukasi politik dan penerapan nilai-nilai demokrasi.

$$r = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[n \sum x^2 - (\sum x)^2][n \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Rumus **korelasi Pearson** yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

Keterangan:

- r = koefisien korelasi
- x = variabel pertama (misalnya, edukasi politik)
- y = variabel kedua (misalnya, pemahaman demokrasi)
- n = jumlah sampel
- $\sum xy$ = jumlah perkalian variabel x dan y

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah hasil penelitian yang merujuk pada desain penelitian di atas dengan tema "Pilkada, Aspek Edukasi, dan Nilai-Nilai Demokrasi di Kalangan Mahasiswa UNM":

1. Partisipasi Mahasiswa dalam Pilkada

Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 385 mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM), hasil penelitian menunjukkan bahwa "62% mahasiswa" telah menggunakan hak pilih mereka dalam Pilkada terakhir. Dari jumlah tersebut, sebagian besar mahasiswa mengakui bahwa mereka memilih berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti media sosial, diskusi kampus, serta debat calon kepala daerah. Namun, "38% mahasiswa" lainnya tidak berpartisipasi dalam Pilkada dengan alasan utama adalah merasa tidak percaya pada sistem politik atau merasa bahwa Pilkada tidak mempengaruhi kehidupan mereka secara langsung.

Sebanyak "70% responden" yang ikut serta dalam Pilkada menyatakan bahwa mereka memperoleh informasi mengenai calon kepala daerah melalui media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial memainkan peran yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan politik mahasiswa. Sementara itu, hanya "15% responden" yang menyatakan bahwa mereka mendapatkan informasi melalui diskusi atau seminar politik di kampus. Ini menandakan bahwa edukasi politik melalui jalur formal di kampus masih belum menjadi sumber utama bagi mahasiswa dalam memahami Pilkada.

2. Edukasi Politik yang Diterima Mahasiswa

Penelitian ini juga mengukur sejauh mana mahasiswa mendapatkan edukasi politik, baik dari lingkungan kampus maupun luar kampus. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa "45% mahasiswa" menyatakan bahwa kampus hanya memberikan sedikit informasi atau sosialisasi terkait Pilkada. Sebaliknya, 55% mahasiswa mengakui bahwa

mereka lebih sering mendapatkan informasi politik dari luar kampus, terutama melalui media sosial dan forum-forum diskusi online.

Meskipun demikian, dari sisi kualitas edukasi politik yang diterima, 60% mahasiswa menyatakan bahwa mata kuliah yang berhubungan dengan sejarah demokrasi dan tata negara cukup membantu mereka dalam memahami konsep dasar demokrasi, namun tidak terlalu relevan dalam mempersiapkan mereka menghadapi Pilkada secara praktis. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan dalam hal penyampaian materi yang lebih kontekstual terkait proses politik lokal seperti Pilkada agar mahasiswa lebih siap berpartisipasi.

3. Pemahaman dan Penerapan Nilai-Nilai Demokrasi

Dalam aspek penerapan nilai-nilai demokrasi, penelitian ini menunjukkan bahwa 80% mahasiswa memiliki pemahaman yang baik terhadap nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berpendapat, kesetaraan, dan toleransi. Mayoritas mahasiswa (sekitar 75%) merasa bahwa kebebasan berpendapat adalah aspek paling penting dalam demokrasi dan harus dijaga di lingkungan kampus. Namun, 25% mahasiswa mengaku bahwa meskipun mereka memahami pentingnya kebebasan berpendapat, mereka jarang berpartisipasi dalam forum-forum politik kampus karena takut akan dampak sosial atau akademik dari pandangan mereka.

Selain itu, nilai kesetaraan juga terlihat diterapkan dengan baik di kalangan mahasiswa UNM, di mana 68% mahasiswa menyatakan bahwa mereka setuju bahwa semua suara, terlepas dari latar belakang sosial ekonomi, memiliki bobot yang sama dalam Pilkada. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip dasar demokrasi, meskipun sebagian dari mereka masih apatis terhadap proses politik itu sendiri.

4. Hubungan Antara Edukasi Politik dan Nilai-Nilai Demokrasi

Hasil uji korelasi Pearson antara edukasi politik yang diterima mahasiswa dan penerapan nilai-nilai demokrasi menunjukkan korelasi yang positif dan signifikan dengan nilai korelasi (r) sebesar 0.62. Ini menunjukkan bahwa semakin baik edukasi politik yang diterima oleh mahasiswa, semakin besar kemungkinan mereka untuk mengamalkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kampus maupun di masyarakat umum.

Mahasiswa yang aktif dalam organisasi kampus atau kegiatan politik kampus seperti debat dan diskusi politik memiliki tingkat pemahaman dan penerapan nilai-nilai demokrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak terlibat dalam kegiatan semacam itu. Mereka cenderung lebih percaya diri dalam mengekspresikan pendapat dan lebih menghargai perbedaan pandangan politik di antara teman-teman mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi mahasiswa UNM dalam Pilkada cukup baik, namun masih ada sebagian yang apatis. Edukasi politik melalui kampus masih kurang efektif dalam mempersiapkan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam Pilkada, dengan media sosial menjadi sumber utama informasi politik bagi mahasiswa. Di sisi lain, mahasiswa UNM umumnya memiliki pemahaman yang baik tentang nilai-nilai demokrasi, meskipun dalam praktiknya masih terdapat hambatan dalam penerapan kebebasan berpendapat dan kesetaraan. Hubungan positif antara edukasi politik dan penerapan nilai-nilai demokrasi menunjukkan bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas edukasi politik di kalangan mahasiswa dapat berkontribusi pada penguatan nilai-nilai demokrasi di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

- Bawaslu, A. H.-J., & 2017, undefined. (n.d.). Politisasi identitas dalam kompetisi pemilu di Indonesia pasca 2014. *bawaslu.go.id*. Di
- Caroline, E. (2019). *Metode Kuantitatif*. Media Sahabat Cendekia.
- Chalik, A. (2017). *Pertarungan elite dalam politik lokal*. Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Harefa, D., & Fatolosa Hulu, M. M. (2020). *Demokrasi Pancasila di era kemajemukan*. Pm Publisher.
- Huda, N. (2017). Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia. Hutapea, B. (2015). Dinamika hukum pemilihan kepala daerah di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(1), 1–20.
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana.
- Kesiapan, M., Dalam, B., Pelanggaran, M., Pemilu, S., Mekanisme, M., Sengketa, P., ... Pringgodigdo, P. (n.d.). MeMotret Penegakan HukuM PeMilu 2014.
- Perangin-angin, L. L. K., & Zainal, M. (2018). Partisipasi politik pemilih pemula dalam bingkai jejaring sosial di media sosial. *Jurnal Aspikom*, 3(4), 737–754.
- Prihatiningsih, T. S. (2021). Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Kebangsaan untuk Menghasilkan Dokter yang Berakuntabilitas Sosial. *Menggali Pondasi Karakter Bangsa Dengan Semangat*, 50.
- Rahmaini, P., Bagenda, C., & Kusnadi, H. (2022). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. CV Pena Persada.
- Ramdani, D. (2022). Problematika Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Pada Masa

Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024.

- Sardini, N. H. (2011). *Restorasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia*. Fajar Media Press.
- Sawir, M. (2020). *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Deepublish.
- Sedarmayanti, S. H. (2012). Strategi penguatan etika dan integritas birokrasi dalam rangka pencegahan korupsi guna meningkatkan kualitas pelayanan. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 9(3), 5.
- Soerdawo, V., Zuriah, N., Yumitro, G., & Jha, G. (2019). Sensitivitas gender dalam partai politik di Indonesia dan India.
- Sutrisman, D. (2019). *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*. Guepedia.
- Tiansah, A. (2023). Peran Sosialisasi Politik Terhadap Tingkat Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada 2019 Di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas. *Praja: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 11(2), 68–79.
- Tjenreng, M. B. Z. (2020). *Demokrasi di Indonesia melalui pilkada serentak*. Penerbit Papas Sinar Sinanti.
- Tuhuteru, L. (2022). *Pendidikan Politik Kaum Muda Kontemporer*. CV. AZKA PUSTAKA.
- Windharti, R., Nurhandjanti, N., Publicuho, K. A.-J., & 2021, undefined. (n.d.). Pragmatisme Dalam Kandidasi Calon Anggota DPR Partai Nasdem Pada Pemilu 2019. *academia.edu*.